



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Pos Kota

Dewan Geram, Anggaran Alkes Dicoret dari APBD 2023

” Di Mana Hati Nurani Kalian Lihat Warga DKI Sengsara Karena Keterbatasan Alat Kesehatan ”

JAKARTA (Poskota) - Anggaran pengadaan alat kesehatan (alkes) untuk 15 RSUD di DKI Jakarta senilai Rp 220,8 miliar, dicoret dari APBD 2023. Hal ini memantik polemik antara DPRD dengan Pemprov DKI. Apalagi, pencoretan anggaran tersebut tanpa sepengetahuan Komisi E DPRD DKI.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI, Basri Baco, mengatakan bahwa pengadaan Alkes merupakan kategori darurat dan mendesak (darsak), meski Dinas Kesehatan tidak memasukkannya ke dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

Namun menurut Basri, jika berkaca pada laporan masyarakat dan peninjauan langsung dewan ke beberapa RSUD di DKI, masih banyak yang kekurangan alkes.

”Masyarakat untuk pemeriksaan MRI (magnetic resonance imaging/teknik pemindaian radiologi) saja, mesti nunggu tiga bulan. Untuk CT-scan, mesti tunggu tiga bulan. Mau operasi juga tunggu sebulan. Kan keburu meninggal pasiennya,” ujar Baco, Selasa (17/1/2023).

Basri Baco juga mengaku, melihat kenyataan bahwa banyak keluhan dari masyarakat terkait layanan kesehatan di sejumlah RSUD di Jakarta. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, masyarakat terpaksa harus mengantre.

”Sekarang saja, untuk mendapat ruang ICU dan NICU, itu harus antre. Mau inkubator juga harus antre. Di mana hati nurani kalian melihat warga DKI Jakarta

sengsara, karena keterbatasan alat-alat kesehatan kita,” sindirnya.

Anggota Komisi E DPRD DKI ini membandingkan dengan daerah lain di Pulau Jawa yang memiliki alat kesehatan lebih lengkap dan canggih. Seharusnya, kata dia, Pemerintah DKI Jakarta dapat mengungguli alkes daerah lain, karena ditopang dengan anggaran paling besar di Indonesia, hingga mencapai Rp 83,7 triliun pada 2023.

”Ini kelihatan sekali kalau pejabat Pemda DKI tidak pro terhadap kesehatan masyarakat. Padahal, yang kami perjuangkan ini masyarakat kecil yang memakai BPJS. Bukan orang yang punya uang. Kalau banyak uang, bisa pilih rumah sakit swasta dengan tarif mahal dan tidak antre,” ungkap dia.

Baco meminta agar pejabat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta untuk bertobat. ”Cepat bertobatlah para

pejabat DKI, sebelum terlambat,” sambung Baco.

Sekretaris DPD Golkar DKI ini juga berharap, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyelidiki hilangnya anggaran pengadaan Alkes tersebut. Padahal, Komisi E DPRD telah menyetujui anggaran tersebut untuk kepentingan masyarakat banyak.

”Fraksi Golkar meminta Pj Gubernur DKI Jakarta mengusut dan mengevaluasi pihak-pihak yang terlibat dalam penghilangan dana Alkes yang telah disahkan oleh Badan Anggaran (Banggar) dan rapat Paripurna di DPRD DKI Jakarta ini,” tegas Baco.

Sementara Kepala BPKD DKI Jakarta, Michael Rolandi, menjelaskan alasan dicoretnya anggaran alkes tersebut. Menurut Michael, pencoretan anggaran itu diputuskan dalam Rapat Pimpinan Gabungan (Rampung) Banggar bersama TAPD, pada Rabu (28/12) silam.

Alasannya, anggaran tersebut tidak tercantum dalam RKPD serta Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2023. Sehingga tidak boleh dianggarkan di APBD.

”Pada saat dari evaluasi Kemendagri, TAPD rapat di ruang pola. Ini menyikapi hasil evaluasi, salah satu di antaranya yang di halaman 91 hasil evaluasi, dinyatakan program kegiatan dan sub kegiatan yang belum tercantum dalam RKPD dan KUA-PPAS tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam RAPBD 2023,” jelasnya.

Namun pernyataan Michael ini disangkal Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Iman Satria. Dia menyebut, banyak anggaran yang tak tercantum dalam RKPD maupun KUA-PPAS, tapi tetap diloloskan dalam APBD 2023. Salah satunya adalah anggaran renovasi GOR di Jakarta. **(Aldi/Mif)**